

Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengembangan SMK dan SMK yang Ideal

Oleh:

Dr. Bernardus Sentot Wijanarka, MT
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY
e-mail: wijanarka.1@gmail.com

Abstrak

Program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu “tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Dalam rangka meningkatkan kualitas SMK, maka berdasarkan sembilan sasaran strategis direktorat pembinaan SMK memberikan bantuan- bantuan kepada SMK dalam bentuk dana atau *block grant*.

Kata kunci: SMK, program, pendidikan

Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012

Pembahasan atau paparan tulisan ini berdasarkan *Garis- garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012* yang disusun oleh Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Tahun 2012. Prioritas pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2009-2014 adalah “Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.”

Prioritas- prioritas tersebut di atas diwujudkan dalam lima substansi inti. Substansi inti yang berkaitan langsung dengan pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah: akses pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum, dan kualitas. Pada substansi **akses** pendidikan dasar-menengah, ditargetkan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan setingkat SMA (SMK, SMA, MA) dari 69% tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2014, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah

dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat lambatnya 2014 dan penyediaan sambungan internet berisi materi pendidikan di sekolah tingkat menengah selambat lambatnya tahun 2014. Pada substansi **metodologi**, penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), akan tetapi pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-Bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2012 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah yang diterapkan di 25% sekolah pada tahun 2012 dan 100% pada tahun 2014.

Substansi **pengelolaan** diarahkan pada pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong pengaktifan peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan dewan pendidikan di tingkat Kabupaten. Substansi **kurikulum** diarahkan pada penataan ulang/ pengembangan kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*). Substansi **kualitas**, diarahkan pada penyiapan dokumen mutu untuk sertifikasi ISO 9001:2008, pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SPN), serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.

Orientasi Program

Pada hakekatnya, program dan kegiatan pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu “tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut dilakukan dengan ketercapaian sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi

yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- (1) APK nasional melampaui target nasional (85%)
- (2) Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditasi
- (3) Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMK dan SMK SBI atau RSBI
- (4) 70% SMK bersertifikat ISO 9001:2008
- (5) Sekurang-kurangnya 90% SMK melaksanakan e-pembelajaran (*e-learning*)
- (6) 70% Lulusan SMK bekerja pada Tahun Kelulusan
- (7) 85% SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan
- (8) Menurunnya *disparitas* gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 %
- (9) Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa SMK yang bisa memenuhi sasaran strategis tersebut di atas bisa dikatakan sebagai SMK yang bermutu menurut versi kementerian pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 2012, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut di atas direktorat pembinaan SMK memberikan bantuan- bantuan kepada SMK dalam bentuk:

- (1) Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK
- (2) Bantuan Pengembangan Kewirausahaan SMK/*Teaching industry*
- (3) Bantuan Pemanduan Kewirausahaan SMK
- (4) Bantuan Pengembangan SMK di Pondok Berbasis Pesantren/Komunitas
- (5) Bantuan Pengembangan SMK RSBI
- (6) Bantuan Pembinaan SMK yang Memiliki Nilai Rata-rata UN Rendah
- (7) Bantuan (*Block Grant*) SMK ADB Invest
- (8) Bantuan SBP (*School Bussiness Plan*)
- (9) Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (Baru)
- (10) Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK (Lanjutan)
- (11) Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
- (12) Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK

- (13) Bantuan Pengembangan Laboratorium Multimedia
- (14) Bantuan Pengadaan Komponen Peralatan Bidang Agribisnis dan Agroteknologi
- (15) Bantuan Pengadaan Peralatan SMK Seni, Kerajinan, dan Pariwisata
- (16) Penyaluran Bantuan Langsung Beasiswa Pertanian dan Pelayaran
- (17) Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi
- (18) Bantuan Beasiswa Program Keahlian Khusus
- (19) Bantuan *Block Grant* Penyediaan Peralatan, bahan, dan kelengkapan lainnya untuk LKS
- (20) Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK
- (21) Pengandaan/Pencetakan Naskah Ujian Produktif.

Bagaimanakah SMK yang Ideal?

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Permendiknas No. 41 tahun 2007).

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan ditujukan untuk membentuk tenaga kerja terampil tingkat menengah. Menurut Finch dan Crunkilton (1999: 14) tujuan akhir kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur melalui pencapaian prestasi berupa nilai tetapi melalui hasil dari pencapaian tersebut, yaitu hasil dalam bentuk unjuk kerja di dunia kerja. Dengan demikian, kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi pada proses

(berupa pengalaman-pengalaman dan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan sekolah) dan produk (efek dari pengalaman-pengalaman dan kegiatan-kegiatan tersebut pada lulusan).

Selaras dengan pendapat di atas pada landasan filosofi kurikulum SMK dikemukakan, bahwa kurikulum disusun untuk mengemban misi agar dapat turut mendukung perkembangan kebudayaan pada arah yang positif. Kurikulum SMK seharusnya memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut: (1) pendidikan harus menanamkan tata nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan pembentukan watak dan perkembangan kehidupan manusia; (2) pendidikan harus memberikan sesuatu yang bermakna, baik yang ideal maupun pragmatis sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan (3) pendidikan harus memberikan arah yang terencana bagi kepentingan bersama peserta didik, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Depdiknas, 2004).

Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari berbagai macam bidang keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang ada di dunia kerja. Semua bidang keahlian di SMK memiliki tujuan yang secara umum mengacu pada isi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan ialah sebagai wahana untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada masa yang akan datang yang selalu mengalami perubahan. Pakar pendidikan kejuruan Mobley mengemukakan tentang filosofi pendidikan kejuruan yang seharusnya diikuti oleh pihak yang terlibat yaitu: (1) *C& T education must be a part of the total education program*, (2) *C&T education must be available to all people*, (3) *C&T education must be everyone's concern*, (4) *Professionalization of C&T must continue*, dan (5) *Student organizations must be considered part of the total C&T program*.

Tujuan pendidikan kejuruan dan filosofi yang dipaparkan di atas sejalan dengan torema yang dikemukakan oleh Charles Prosser yang merupakan tokoh penting dalam pembentukan pendidikan kejuruan (*Vocational Education* atau *Career and Technical Education*) di Amerika Serikat. Prosser mengemukakan enam belas teorema tentang

pendidikan kejuruan. Teorema yang pertama dan kedua berhubungan langsung dengan proses pembelajaran di pendidikan kejuruan, yaitu :

(1) *Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is replica of the environment in which he must subsequently work*, dan (2) *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation it self* (Camp dan Johnson, 2005: 37).

Pembelajaran berbasis kompetensi menganut prinsip pembelajaran tuntas untuk penguasaan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga siswa dapat bekerja sesuai dengan kompetensi profesi yang dituntut oleh dunia kerja. Agar siswa bisa belajar secara tuntas, mulai kurikulum SMK tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam proses pembelajaran digunakan prinsip *learning by doing* dan *individualized learning*. *Learning by doing* dapat menjadikan pembelajaran bermakna dan dapat dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis produksi. *Individualized learning* memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan masing-masing dengan pembelajaran sistem modular. Kedua prinsip tersebut sesuai dengan filsafat konstruktivistik bahwa pengetahuan siswa dibangun secara aktif, individual, dan personal, dan didasarkan pada pengetahuan yang sudah ada (Pardjono, 2008: 6). Dalam proses belajar siswalah yang harus mendapatkan tekanan, dan mereka harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka bukannya guru atau orang lain (Suparno, 1997: 81).

Berdasarkan hasil revidi dari pengalaman negara-negara Asia, beberapa pelajaran penting dapat diambil berdasarkan pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan di negara-negara yang sedang berkembang (Tilak, 2002). Pelajaran- pelajaran penting tersebut adalah:

(1) *VET is important for economic growth. But the relationship is not linear. So each country has to decide the extent of VET that has to be developed, depending upon the level of development and demand for skills. Plans for VET should be preceded by detailed manpower analyses and forecasts.*

(2) *Since both general and specific human capital contribute to economic growth, a balance has to be struck between size of general education and vocational education. Further, vocational education need not necessarily be purely vocational and technical. It should*

also include, like in Japan and Korea, general skills and attributes that are useful across a wide variety of occupations. This is particularly important in the rapidly changing economic systems.

- (3) As specific human capital development can take place both in formal schools and also in the firm-based institutions, it may be important to examine which vocational and technical skills are to be provided in schools and which in the training institutions and enterprise-based organisations.*
- (4) As vocational education is necessarily expensive, the government should make adequate allocation of resources for vocational education. Poor investments cannot yield attractive returns.*
- (5) Vocational education should not promote inequalities within the educational system. This requires provision of good quality vocational education and training, comparable, if not superior to, general secondary education that would avoid suspicions on the part of the people on the intentions of the government in providing VET. It also requires effectively linking of vocational education with higher education, so that vocational education is not perceived as dead-end, with no opportunities to go for higher education.*
- (6) Given the experience of many countries in Asia, except Japan, the government has to take a dominant role in promoting VET. Private sector may not be able to provide good quality VET.*
- (7) Lastly, issues relating to VET are not just curriculum questions, nor are they just economic. They are intricately linked with social, cultural, historical, economic, technical, and political parameters. Hence formulation of sound and effective policies and plans of VET requires an inter-disciplinary development approach, treating VET as an integral part of overall educational planning.*

Menurut rekomendasi Unesco (2001), pendidikan teknik dan kejuruan bagi orientasi dan pendidikan siswa harus mencakup pembelajaran teori dan praktik yang seimbang. Selain itu pengelola program studi harus bekerja sama dengan para komunitas profesional di bidangnya. Proses pembelajaran di program studi hendaknya: (1) didasarkan pada pendekatan pemecahan masalah dan eksperimental dan melibatkan pengalaman

dalam perencanaan metode dan pengambilan keputusan; (2) memperkenalkan pelajar untuk spektrum yang luas dari bidang teknologi dan situasi kerja yang produktif; (3) mengembangkan prosedur- prosedur khusus mengenai keterampilan praktis yang berharga seperti penggunaan alat, perbaikan dan prosedur pemeliharaan dan keselamatan, dan menghargai nilai kerja; (4) mengembangkan suatu apresiasi mengenai desain, pengerjaan dan kualitas yang baik; (5) mengembangkan kemampuan untuk berfungsi sebagai anggota tim dan berkomunikasi mengenai informasi teknis; (6) dekat dengan lingkungan setempat tanpa membatasi diri.

Pendidikan kejuruan ditandai dengan hubungan yang sangat dekat dengan tempat kerja. Pembelajaran teoritis dan praktis digabungkan sedemikian rupa sehingga kesesuaiannya terjamin. Para siswa di pendidikan kejuruan belajar keterampilan yang sebenarnya di dunia praktis, dan mempelajari dan merefleksikannya dalam dunia teoritis. Pada pendidikan kejuruan baik teori maupun praktik memiliki nilai yang sama untuk pembelajaran di sekolah dan belajar di tempat kerja. Dengan demikian, baik pembelajaran teori maupun praktik tidak terbatas pada tempat belajar siswa (DG Education and Culture, 2005:6).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembelajaran di pendidikan kejuruan meliputi pembelajaran teori dan praktik. Program studi bekerja sama dengan pihak komunitas profesional dalam bidangnya, sehingga pembelajaran dilaksanakan di sekolah dan di tempat kerja yang sesuai dengan program studi yang dipelajari. Dengan demikian pembelajaran pada pendidikan kejuruan mengarah pada pembelajaran sesuai dengan dunia kerja.

Perbandingan antara Kondisi SMK dengan SMK Ideal

Beberapa pertanyaan bisa diajukan oleh pihak pengelola SMK untuk mengetahui kondisi sekolahnya. Pertanyaan- pertanyaan tersebut adalah:

- (1) Bagaimanakah perbandingan antara kondisi SMK yang ada sekarang dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan? Pertanyaan tersebut bisa dijawab melalui evaluasi dan analisis secara jujur yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga

diperoleh gambaran kondisi sekolah yang sebenarnya. SMK yang ideal seharusnya melebihi dari ketentuan dalam SPN karena SPN adalah standar minimal.

- (2) Bagaimanakah perbandingan antara kondisi SMK yang ada sekarang dibandingkan dengan filosofi dasar SMK?
- (3) Bagaimanakah perbandingan antara kondisi SMK yang ada sekarang dibandingkan dengan keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)?

Penutup

Direktorat pembinaan SMK berusaha terus menerus untuk mengembangkan SMK dalam hal proses pembelajaran, sarana dan prasarana agar pembelajaran di SMK bisa berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sampai saat ini di Indonesia belum ada SMK yang ideal sesuai dengan tujuan SMK maupun filosofi SMK yang dikemukakan oleh para ahli. Dengan demikian, maka semua pihak agar berusaha mewujudkan SMK yang ideal tersebut. Semoga SMK bisa menjadi pusat pendidikan tenaga kerja tingkat menengah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Camp, W.G., & Johnson, C.L. (2005). Evolution of a Theoretical Framework for Secondary Vocational Education and Career and Technical Education over the Past Century. Dalam Gregson, J.A, dan Allen, J.M.(Eds). *Leadership in Career and Technical Education: Beginning The 21st Century*, pp(29-62). Columbus Ohio: UCWHRE.
- Direktorat Pembinaan SMK. (2008). *Kajian Peranan SMK Kelompok Teknologi Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur*. Jakarta : Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2004). *Kurikulum SMK Edisi 2004*.
- Depdiknas. (2009). *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) SMK*
- Depdiknas. (2009). *Permendiknas No. 28, Tahun 2009, tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*.
- Depdiknas. (2010). *Permendiknas No. 2, Tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*.

- DG Education and Culture. (2005). *The Use of ICT in iVET*. Diambil pada tanggal 20 Desember 2011, dari http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/doc/studies/ict_in_vocational_en.pdf
- Finch, C.R. , & Crunkilton, J. R. (1999), *Curriculum Development in Vocational and Technical Education : planning, content and implementation* (5th Ed.). Boston: Allyn and Bacon .
- Pardjono. (2008). *Urgensi Penerapan Konstruktivisme dalam Pendidikan Kejuruan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparno, P. (1997). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilak, B.G. (2002). *The Handbook on Educational Research in the Asia Pacific Region* eds. John P Keeves and Rye Watanabe. Kluwer Academic Publishers 2002).
- Unesco. (2001). *Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first Century Unesco Recommendations*.